

# TRANSFORMASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM NON FORMAL DI KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA 1920-2021

**Irvan Mustofa Sembiring, Hasan Asari, Muaz Tanjung<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia  
*irvanbiring366@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to analyze and discover the transformation of non-formal Islamic educational institutions in Karo District. This type of research is qualitative with historical methods. This research informs that non-formal Islamic educational institutions in Karo District were originally in the form of Islamic boarding schools in Tiga Beringin village which were established in 1920. Then these Islamic educational institutions moved to Kuala Baru in 1936 and underwent a transformation into madrasas in 1947, under development then this Islamic educational institution was transformed into a boarding school. The occurrence of dynamics in the form of this transformation is one of the strategies in the progress of non-formal Islamic educational institutions in Karo District.*

**Keywords:** *Transformation, Islamic Education, Non-Formal.*

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan transformasi lembaga pendidikan Islam non formal di Kabupaten Karo. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode sejarah. Penelitian ini menginformasikan bahwa lembaga pendidikan Islam non formal di Kabupaten Karo pada mulanya berupa pondok pengajian di desa Tiga Beringin yang berdiri pada tahun 1920. Kemudian lembaga pendidikan Islam ini berpindah ke Kuala Baru pada tahun 1936 dan mengalami transformasi menjadi madrasah pada tahun 1947, dalam perkembangan selanjutnya lembaga pendidikan Islam ini bertransformasi menjadi pondok pesantren. Terjadinya dinamika dalam bentuk transformasi ini merupakan salah satu strategi dalam kemajuan lembaga pendidikan Islam non formal di Kabupaten Karo.

**Kata Kunci:** *Transformasi, Pendidikan Islam, Non Formal*

## **A. PENDAHULUAN**

Berbagai dinamika dialami oleh minoritas ditengah-tengah mayoritas. Seperti disebutkan dalam sebuah penelitian “Minoritas Muslim di Yogyakarta: Antara Hubungan Sosial dan Motivasi Agama” bahwa kaum yang minoritas sering mendapatkan perlakuan yang berbeda karena keberadaan jumlahnya yang lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat mayoritas. Kemudian Kehadiran agama agama kecil cenderung diposisikan pada lingkaran terluar dari agama-agama besar. Dalam cara yang lebih ekstrim, sangat disayangkan bahwa kelompok minoritas cenderung dianggap mengambil posisi menyimpang. Keadaan ini bisa terjadi pada masyarakat muslim sebagai minoritas pada masyarakat non-muslim, begitu juga sebaliknya terhadap keberadaan non muslim sebagai minoritas pada masyarakat mayoritas muslim (Warsah, 2019).

Perlakuan yang diskriminatif terhadap kaum minoritas juga masih dapat terjadi beberapa daerah di Indonesia. Seperti dalam sebuah penelitian oleh (Burhanuddin, 2019) yang menganalisa bagaimana kaum minoritas agama di Pasaman Barat dan Dharmasraya terusik dengan implementasi kebijakan otonomi daerah. Dengan mengkaji aturan pendirian gereja dan busana Islami sebagai kasusnya, penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara muslim dan kristiani di daerah tersebut disebabkan karena regulasi otonomi daerah yang bersifat diskriminatif bagi kalangan kaum minoritas. Peneliti berargumen bahwa penerapan kebijakan pemerintahan lokal seperti ketatnya persyaratan membangun rumah ibadah (gereja) dan aturan kewajiban memakai busana Islam bagi pelajar mempunyai implikasi negatif terhadap hubungan antara muslim dan non-muslim di daerah tersebut. Karenanya, pemerintah daerah harus berhati-hati dan mempertimbangkan hubungan kelompok minoritas-mayoritas dalam membuat aturan daerah yang berhubungan dengan agama (Burhanuddin, 2019).

Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara. Ibu kota kabupaten Karo adalah Kabanjahe, dengan luas sebesar 44,65 km<sup>2</sup>. Kecamatan terluas di kabupaten Karo adalah kecamatan Mardinding dengan persentase luas sebesar 12,56%. Sementara kecamatan terkecil yang ada di kabupaten Karo adalah Berastagi dengan persentase luas sebesar 1,43%. Wilayah tertinggi di kabupaten Karo terletak pada kecamatan Naman Teran, sedangkan wilayah terendahnya terletak di kecamatan Laubaleng. Perjuangan para da'i maupun guru-guru agama Islam di Kabupaten Karo walaupun secara perlahan-lahan mempunyai kabar yang baik dan menggembirakan. Dari tahun ke tahun jumlah angka umat Islam di Kabupaten Karo semakin meningkat. Dimulai dari awal tahun 1950-an, diperkirakan umat Islam di Kabupaten Karo berjumlah 5.000-an jiwa. Pada tahun 1960-an ketika Abdul

Salam diangkat menjadi Kepala Jawatan Agama menggantikan Sulaiman Tarigan umat Islam di Kabupaten Karo telah mencapai 10.000-an orang. Selanjutnya pada tahun 1966/1977, jumlah umat Islam telah mencapai angka 76. 525 orang atau 28,2 % dari seluruh penduduk daerah Kabupaten Karo. Pada tahun 1977 jumlah penduduk yang memeluk agama Islam sebesar 78.740 jiwa atau 28.14 % dari keseluruhan total jumlah penduduk Kabupaten Karo berjumlah 279.810 jiwa.

Selanjutnya menurut data statistik tahun 2004, umat Islam di Kabupaten Karo berjumlah 80.970 atau 25,6 % dari total jumlah penduduk sebesar 311.718 jiwa. Kemudian data statistik pada tahun 2014, bahwa jumlah umat Islam berada dalam angka 87. 492 atau 22,8 % dari jumlah total penduduk 382.622. Kemudian dalam perkembangan beberapa tahun kedepannya, umat Islam semakin meningkat jumlahnya di Kabupaten Karo seperti pada tahun 2021 (Kantor Kementerian Agama, 2021) bahwa umat Islam berjumlah 97.771 atau 31,9 % dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Karo 306.179 jiwa.

Dari jumlah angka penduduk Islam di Kabupaten Karo, menunjukkan bahwa umat Islam di Kabupaten Karo merupakan umat Islam yang minoritas. Walaupun terdapat beberapa desa dalam Kabupaten Karo yang mayoritas umat Islam, tetapi secara keseluruhan jumlah penduduk Karo mayoritasnya non muslim. Latar belakang daerah seperti ini akan menjadi sebuah faktor terhadap perkembangan maupun kemunduran Islam di Kabupaten Karo khususnya dalam hal ini adalah pendidikan Islam di Karo. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Karo tidak bisa menjalankan program pendidikannya dengan baik, disebabkan ekonomi yang kurang baik dalam lembaga pendidikan tersebut. Padahal dana pendidikan dari pemerintah itu ada dan tidak teralokasikan secara merata kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam karena lebih mengutamakan mayoritas penduduk di suatu daerah. Kemajuan dalam sistem pendidikan Islam juga sulit dicapai karena minoritas Islam di daerah tersebut, seperti peserta didik yang sangat minim dalam beberapa lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Karo. Bahkan program lembaga pendidikan Islam non formal seperti majelis taklim di suatu pedesaan juga sangat terkendala karena sebagian dari daerah Karo masih terdapat berupa ancaman terhadap para guru pendidikan Islam yang menjalankan tugasnya di Karo. Fenomena-fenomena yang tersebut merupakan keluhan-keluhan yang penulis terima dari beberapa tokoh maupun para da'i di Karo. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang daerah tersebut yang berstatus minoritasnya Islam.

Pemerintah daerah yang dikuasai oleh kelompok mayoritas non-muslim pasti sangat kecil kemungkinannya memberikan perhatian terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam, sehingga kebijakan-kebijakannya akan sangat diskriminatif dan kurang bahkan tidak pernah

menyentuh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kebijakan – kebijakan tersebut semakin diskriminatif manakala Pemerintah daerah yang masih salah tafsir dalam memahami peraturan Mendagri yang sebetulnya tidak melarang pemerintah daerah memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam (madrasah) (Agustin, 2021).

Lembaga pendidikan Islam yang berada di Kabupaten Karo yang mayoritas non muslim telah mampu bertahan semenjak tahun 1920 hingga saat ini dan telah beberapa kali melakukan transformasi dalam kelembagaan maupun sistem pendidikannya, khususnya dalam hal ini adalah lembaga pendidikan Islam non formal di Kabupaten Karo yang merupakan lembaga pendidikan Islam yang lebih awal dari lembaga pendidikan Islam formal di Karo yang telah menjalani berbagai rintangan di tengah-tengah mayoritas non muslim.

## **B. METODE**

Secara khusus lokasi penelitian ini berada di desa Kuala Baru kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian sejarah. “Penelitian sejarah (*historical research*) ini memiliki lima tahapan terpenting, yaitu: a. Pemilihan topik, b. Pengumpulan sumber, c. Verifikasi (keabsahan sumber, kritik sejarah), d. Interpretasi: analisis, dan sintesis, dan e. Penulisan” (Kuntowijoyo, 2013). Sumber data penelitian ini berasal dari sumber primer seperti sumber yang berasal dari orang yang menjadi saksi sejarah, begitu juga yang berasal dari artifak maupun studi literatur yang secara langsung bersentuhan dengan penelitian, kemudian sumber sekunder yang menjadi tambahan. Instrumen pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi dan penelusuran referensi. “Verifikasi data melalui autentisitas data, dan kredibilitas data” (Sjamsuddin, 2012). Kemudian interpretasi data yang selanjutnya melangkah kepada historiografi.

## **C. HASIL PEMBAHASAN**

Dalam konteks pendidikan, Islam termasuk yang berkembang di wilayah Nusantara dan diakui telah memainkan peran yang sangat signifikan, bahkan sangat dominan, dengan mengambil posisi terdepan dalam pendirian, pengembangan, serta pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan. Dalam hal ini, kita harus menyebut lembaga pendidikan semacam pondok, pesantren, meunasah, surau, atau lembaga pendidikan tradisional sejenis, sebagai

bentuk lembaga pendidikan Islam periode awal yang dalam konteks wilayah Nusantara telah menempati posisi sentral dari dinamika perkembangan dan kebangkitan intelektual Islam secara keseluruhan. Dikatakan demikian karena pada kenyataannya lembaga-lembaga pendidikan tradisional tersebut di wilayah mana pun ia berkembang telah berfungsi sebagai sarana untuk sosialisasi berbagai pemikiran keislaman, dan bahkan sebagai tempat lahirnya sejumlah karya penting dalam berbagai bidang keagamaan (Madmarn, 2001).

Dalam perkembangan berikutnya, ketika arus perubahan atau modernisasi semakin deras melanda berbagai kawasan dunia Muslim, lembaga-lembaga pendidikan tradisional tersebut dipaksa berhadapan dengan, realitas modernisasi sistem pendidikan, yang dalam beberapa hal, dianggap mengancam eksistensi mereka. Memang nasib lembaga-lembaga pendidikan tradisional tersebut berbeda antarsatu wilayah dengan wilayah lainnya. Sebagian lenyap tergusur oleh ekspansi sistem pendidikan modern untuk tidak menyebut sistem pendidikan "sekuler", tetapi sebagian lagi mengalami transformasi menjadi, atau setidaknya menyesuaikan diri dengan, sistem pendidikan modern tersebut (Madmarn, 2001).

Perkembangan zaman yang menuntut lembaga pendidikan Islam untuk terus melakukan pembaharuan, juga terjadi pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Karo. Seperti yang dialami oleh lembaga pendidikan Islam non formal Karo semenjak tahun 1920 hingga saat ini juga terus melakukan berbagai dinamika, seperti lembaga pendidikan Islam non formal Karo yang melakukan transformasi kelembagaan maupun sistem pendidikannya, seperti:

### **Pondok Pengajian di Tiga Beringin**

Mula-mula lembaga pendidikan Islam non-formal di Kabupaten Karo adalah Sebuah pondok pengajian yang terletak di desa Tiga Beringin Kecamatan Tiga Binanga yang didirikan oleh H. Sulaiman Tarigan pada tahun 1920. Lembaga pendidikan Islam non-formal ini pada tahun 1936 dipindahkan ke desa Kuala Baru yang kemudian berubah statusnya menjadi Madrasah Sirajul Huda kemudian menjadi sebuah pondok pesantren Sirajul Huda Tiga Binanga (S. Tarigan, 2021).

Sulaiman Tarigan yang berperan dalam dakwah Islam di Kabupaten Karo, tidak akan bertahan selama-lamanya. Sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan pasti akan merasakan mati yang berarti meninggalkan dunia ini. Salah satu faktor yang mendorong Haji Sulaiman Tarigan dalam mengupayakan Islam tetap berjalan di Kabupaten Karo adalah Kemungkinan besar Haji Sulaiman Tarigan sangat menyadari bahwa bagaimanapun kuat dan perkasanya seorang manusia, tetap saja manusia itu memiliki keterbatasan. Begitu juga dengan diri beliau yang semakin hari ia merasakan bahwa dirinya semakin tua. Faktor lain yang mendukung

Haji Sulaiman Tarigan tersebut adalah situasi iklim tentang keislaman di Kabupaten Karo masih sangat minim dalam waktu yang belum lama, dan dakwah Islam di Kabupaten Karo belum sepenuhnya berhasil. Untuk itulah ia harus berpikir keras bagaimana strategi agar dakwah Islam di Kabupaten Karo tidak boleh berhenti hanya karena tidak ada da'i atau orang-orang yang meneruskan perjuangan Islam tersebut. Kemudian dari sisi lain umat Islam semakin banyak bertambah di Kabupaten Karo, atas dasar itu perlu dibina terutama tentang ilmu-ilmu peribadatan sehari-hari (S. Tarigan, 2021). Tujuan didirikannya pondok pengajian di Tiga Beringin selain sebagai melahirkan kader-kader da'i di Kabupaten Karo juga untuk membina umat yang baru Islam supaya benar dalam beramal pada peribadatan sehari-hari. Bagaimana *thaharah* (bersuci) yang benar, bagaimana shalat yang benar, juga dalam pondok pengajian ini sebagai pusat (*central*) dalam memberantas buta aksara Arab (S. Tarigan, 2021).

Pada tahun 1920 keinginan Haji Sulaiman Tarigan untuk mendirikan Pondok pengajian di Tiga Beringin tersebut akhirnya tercapai didirikan. Pada waktu itu banyak murid-murid yang ingin belajar Islam kepada Sulaiman Tarigan. Murid-murid pondok pengajian Tiga Beringin berasal dari kalangan orang tua baik laki-laki maupun perempuan, *muallaf* (orang yang baru masuk Islam). Bagi muridnya yang jauh akhirnya terpaksa mondok beberapa hari di Tiga Beringin. Demikianlah seterusnya sehingga pengajian tersebut terus berkembang secara pesat. Kemudian yang menjadi Guru dalam pondok pengajian Tiga Beringin langsung dibimbing oleh H. Sulaiman Tarigan, dengan perkembangan pondok pengajian tersebut lalu guru-guru pun mulai didatangkan dari Aceh Tenggara secara bergantian (S. Tarigan, 2021).

Kurikulum yang digunakan pada pondok pengajian Tiga Beringin adalah berkisar untuk membetulkan amalan *fardhu 'ain* dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kitab perukunan, begitu juga dalam pondok pengajian ini merupakan *central* (pusat) dalam memberantas buta aksara Arab. Orang tua selain belajar membenarkan amalan dalam kehidupan sehari-hari mereka juga belajar membaca Alquran dari H. Sulaiman Tarigan. Metode yang digunakan dalam pembelajaran di pondok pengajian Tiga Beringin adalah metode ceramah, metode *halaqah*, juga metode praktik dalam arti H. Sulaiman Tarigan mengajarkan kepada murid-muridnya dengan cara mempraktikkan secara langsung, seperti amalan shalat, berwudhu dan lain sebagainya (S. Tarigan, 2021).

Tempat mereka melakukan pengajian adalah dalam bentuk gubuk-gubuk di Tiga Beringin. Gubuk-gubuk yang didirikan tersebut pada dasarnya adalah tempat untuk orang yang bermukim. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya tempat belajar di Mushalla. Pada ketika malam hari setelah habis maghrib dan makan malam, semua orang Islam dari

kampung-kampung tersebut datang ke Tiga Beringin untuk belajar agama Islam di Langgar/Mushalla. Di Mushalla itulah orang-orang tersebut belajar di waktu malam hari. Dan bagi orang yang tidak pulang ke rumah maka disediakanlah tempat-tempat untuk menginap malam, bahkan murid-muridnya ada yang datang dari daerah Dairi yang menginap di Tiga Beringin dengan gurunya H. Sulaiman Tarigan. Mereka pada malam hari datang ke tempat pengajian dengan memakai obor untuk menimba ilmu kepada tuan guru. Setelah sekitar satu minggu tuan guru mengajarkan ilmunya di tempat pengajian tersebut, maka Tuan guru Haji Sulaiman kembali menuntut ilmu agama ke Kuta Cane dengan berjalan kaki (Sembiring, 2016). Dengan berbagai perkembangan yang dilalui oleh pondok pengajian Tiga Beringin tersebut, pada akhirnya setelah perpindahan dari Tiga Beringin ke Kuala Baru pada tahun 1936 pondok tersebut resmi pada beberapa tahun kemudian menjadi menjadi Madrasah Sirajul Huda pada tahun 1947.

### **Madrasah Sirajul Huda Tiga Binanga**

Seiring dengan perpindahan Pondok Pengajian dari Tiga Beringin tersebut Pada tahun 1936, berbarengan juga dengan selesainya pembangunan Masjid Jami' Kuala Baru berkat wakaf saudagar India bernama H. Qasim dan sumbangan tanah dari kepala desa Kuala yaitu Bogoh Sebayang. Hal ini juga menjadi faktor Pondok pengajian itu dikembangkan ke Kuala Baru Tiga Binanga, karena telah memiliki fasilitas masjid dalam lingkungan pondok pengajian. Untuk menjalankan aktifitas pondok pengajian pada masa ini, Haji Sulaiman dibantu oleh beberapa murid dan keponakannya, yaitu Abdul Manaf Tarigan dan Abdul Salam Tarigan, Muhammad Saleh Tarigan, Abdul Rahman Tarigan dan Abdul Rahim Tarigan yang menunjukkan bahwa telah ada murid-murid dari Haji Sulaiman Tarigan yang menjadi guru dalam pondok pengajian tersebut (Profil Pondok Pesantren, 2005).

Ternyata dengan perpindahan pondok pengajian tersebut dari Tiga Beringin ke Kuala Baru mengalami perkembangan yang pesat. Sehingga pada tahun 1944 pondok pengajian dari Kuala Baru membuka cabang di Simpang Pergendangen atas sebuah tanah yang diwakafkan oleh Haji Fakhrudin Tarigan. Pada masa ini tugas pembinaan murid dilimpahkan Haji Sulaiman Tarigan kepada salah satu menantunya, Muhammad Saleh Wahab Perangin-angin.

Setelah pondok pengajian tersebut berhasil didirikan di Simpang Pergendangen pada tahun 1944, kemudian terjadi agresi Belanda di kawasan tersebut pada tahun 1946, sehingga diharuskan untuk mengungsi ke Kuta Cane. Pulang dari pengungsian, bangunan pondok pengajian tersebut telah dibakar oleh Belanda, sehingga pada tanggal 22 Juli 1946 pondok pengajian tersebut pindah kembali ke Kuala Baru. Dengan berpindahnya pondok pengajian dari Simpang Pergendangen ke Kuala Baru, masyarakat muslim setempat bergotong royong

untuk membangun kembali pondok pengajian yang sederhana di Kuala Baru. Sehingga setelah selesai bangunan tersebut pada tahun 1947 secara resmi diberi nama dengan “Madrasah Sirajul Huda”. Pemuka-pemuka agama Tiga Binanga melakukan musyawarah untuk membuat sebuah nama dari Madrasah yang didirikan. Maka hasil dari musyawarah tersebut, menghasilkan bahwa nama yang disepakati dari madrasah tersebut sesuai dengan cita-cita Haji Sulaiman Tarigan adalah Sirajul Huda yang berarti “cahaya petunjuk”. Dan pada tahun 1957, kolonel Djamin Gintings memberikan bantuan kepada madrasah Sirajul Huda tersebut dengan 6 buah lokal.

Ketika pada suatu hari, ada hajatan Raja Sama, di kampung Pegendangen pada tahun 1957, dimana hadir juga panglima Teritorium Bukit Barisan Kolonel Djamin Gintings, Letnan Kolonel Neleng Sembiring, wakil kepala staf, Ngerajai Meliala dan pembesar-pembesar lainnya, juga hadir Haji Sulaiman Tarigan. Pada kesempatan yang ada tersebut Haji Sulaiman Tarigan berbicara dengan panglima Kolonel Djamin Gintings. Panglima yang bertutur *Er-Mama* yang menjadi sebagai *Kalimbubu* nya, dengan hormat mendengarkan kata-kata yang disampaikan Haji Sulaiman Tarigan (Bangun, 2003).

Dari dialog yang cukup blak-blakan, didengarkan juga oleh Letnan Kolonel Neleng Sembiring, Panglima Djamin Gintings menyetujui memberikan bantuan membangun 6 lokal untuk Madrasah Sirajul Huda di Kuala Baru, menggantikan gedung lama yang sudah tua. Teknik pelaksanaan diserahkan kepada Wakil Kepala Staf untuk menghitung biaya yang diperlukan, dengan meninjau daerah lokasi. Maka pada satu hari Haji Sulaiman Tarigan disertai salah seorang anaknya Malik Tarigan menjumpai wakil Kepala Staf Letkol Neleng Sembiring. Lalu berdasarkan memonya, maka Letnan I Albert Tarigan Pekan menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000 kepada Haji Sulaiman Tarigan bagi pembangunan 6 lokal Pondok Pesantren Sirajul Huda di Kuala Baru (Bangun, 2003).

Menurut H.KP Malik Tarigan, uang Rp. 150.000 itu hanyalah harga dari bahan bangunannya saja, sama sekali tidak termasuk ongkos tukang. Soalnya, masalah tukang ini, karena pandai/tukang adalah Kalimbubu beliau bapak Muhammad Sebayang. Sehingga upah tukang terlupa sama sekali. Padahal, H. KP Malik Tarigan mengatakan, kalau sekiranya dimasukkan upah tukang dalam biaya keseluruhan pembangunan 6 lokal Pondok Pesantren, tentu saja Panglima Kolonel Djamin Gintings menyetujuinya (Bangun, 2003).

Sementara untuk mengurus Madrasah Sirajul Huda tersebut, umat Islam Singalor Lau mengangkat dewan pengurus yang sampai masa pendirian Yayasan Sirajul Huda beberapa kali mengalami pergantian, diantara mereka adalah Abdul Rahman Tarigan (ketua), M. Arsyad Tarigan, Muhammad Zen Ginting, Salim Ginting, Palaren Sembiring Meliala. Raja



Shaf Tarigan (ketua), Panji Tarigan, Muhammad Sebayang. Pa Lembu Sebayang (ketua), Nasir Sebayang, Abdul Samad Tarigan.

Pada 1957, bangunan darurat itu berganti rupa berkat bantuan Panglima Teritorium 1 Bukit Barisan, Kolonel Djamin Gintings, yang menyumbangkan sejumlah uang untuk pembangunan enam ruang belajar semi-permanen di Kuala Baru. Untuk mengurus madrasah tersebut, kaum Muslimin Tiga Binanga membentuk suatu kepengurusan yang anggotanya antara lain: Abdul Rahman Tarigan, M. Arsyad Tarigan, M. Zein Ginting, M. Salim Ginting, Palaren Sembiring, Panji Tarigan, Muhammad Sebayang, Pa Lembu Sebayang, Amantasyah Tarigan, Panji Tarigan, Raja Shaf Tarigan, Abdul Samad Tarigan.

Pondok pengajian yang semulanya berada di Tiga Beringin, tidak memakai kurikulum yang formal sebagaimana yang berlaku menurut kurikulum pemerintahan. Hanya saja pada saat itu mulai dari berdirinya Pondok Pengajian di Tiga Beringin hingga berpindah ke Kuala Baru sampai sekitar Tahun 1958 selalu mempelajari khusus tentang agama, yang bersifat fardhu 'ain seperti Fiqih, Tauhid, Tasawwuf, begitu juga mempelajari tentang belajar membaca dan menulis huruf Alquran dan melayu dan lain sebagainya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Sulaiman Tarigan yang terus menerus menimba ilmu agama Islam hingga akhirnya ilmu yang dimiliki oleh beliau semakin dalam dan mampu membaca dan mengajarkan kitab seperti perukunan, kitab barzanzi, dan juz 'amma. Pada tahap ini Sulaiman Tarigan tidak lagi mengajarkan tentang Islam dengan sistem merekam apa saja yang disampaikan gurunya kemudian menyampaikannya kepada masyarakat Karo. Tetapi beliau telah memiliki panduan tetap tentang apa saja yang diajarkan untuk masyarakat Karo, karena beliau telah mampu untuk mengajarkan kitab seperti perukunan. Apa saja yang terdapat dalam kitab tersebut itu pula yang disampaikan oleh beliau.

Berbagai ilmu yang dipelajari oleh Sulaiman Tarigan, itu pula yang beliau ajarkan kepada masyarakat Karo, khususnya pada saat itu tempat untuk belajar tentang agama Islam adalah di sebuah pondok pengajian Tiga Beringin. Sekalipun Sulaiman Tarigan banyak belajar agama kepada banyak ulama di Aceh dan Medan, namun proses belajar yang dilakukan oleh beliau tersebut tidak secara formal. Tidak ada informasi yang mengatakan bahwa Sulaiman Tarigan telah menamatkan sebuah kitab klasik dalam bidang fiqih, tauhid atau tasawuf sebagaimana yang umumnya terdapat pada santri-santri yang telah lulus pesantren.

Diantara kitab-kitab yang pernah diajarkan dan dibaca dengan baik oleh Sulaiman Tarigan adalah kitab perukunan, begitu juga kitab barjanzi dan juz 'amma. Kitab perukunan berisi materi ajaran Islam khususnya dalam bidang akidah dan fiqih, sedangkan kitab barjanzi

berbicara tentang sejarah Rasul, dan kitab juz ‘amma digunakan untuk mengajarkan membaca Alquran. Dan kitab-kitab ini pula yang diajarkan oleh Sulaiman Tarigan kepada masyarakat Karo.

Kitab perukunan merupakan sebuah kitab yang ditulis dengan huruf jawi (Arab Melayu) yang memuat himpunan segala do’a dan zikir, syahadat, rukun Islam dan tata cara pelaksanaannya, thaharah (bersuci), lafaz-lafaz niat shalat fardhu dan sunnat serta amalan-amalan untuk dilaksanakan kaum Muslimin. Bagi masyarakat Karo muslim, pada umumnya pada saat itu bagi mereka tentang ajaran Islam merupakan hal yang baru. Atas dasar itu sangat tepat jika kitab perukunan itu diajarkan oleh Sulaiman Tarigan kepada masyarakat muslim Karo. Karena dalam kitab perukunan tersebut dapat belajar tentang fardhu ‘ain yang merupakan perkara-perkara ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagaimana Sulaiman Tarigan menerima ilmu-ilmu agama Islam dari gurunya, begitu pulalah cara yang ditempuhnya dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam ke tengah-tengah masyarakat. Biasanya Sulaiman Tarigan duduk di atas tikar dan terkadang menggunakan bangku, kemudian ia membaca kitab perukunan, sementara murid-muridnya mendengarkannya dengan serius.

Metode yang diterapkan oleh Sulaiman Tarigan tersebut sama seperti metode wetonan sebagaimana yang diterapkan oleh pesantren-pesantren salafi, yaitu suatu metode belajar mengajar dimana murid mengikuti pelajaran dengan duduk mengelilingi guru yang menerangkan pelajaran. Sedangkan para murid menyimak pelajaran yang diberikan oleh guru. Metode seperti ini juga disebut dengan metode *halaqah*.

Pada bagian-bagian tertentu dalam menjelaskan istilah-istilah dalam ajaran Islam yang dipandang perlu mendapatkan penjelasan yang lebih dalam, maka Sulaiman Tarigan menjelaskan materi tersebut, dan jika kurang mengena penjelasan tersebut kepada muridnya, maka beliau mencari padanannya dalam budaya Karo. Selanjutnya ia segera menghubungkannya dengan tradisi dan adat istiadat Karo. Dengan metode seperti ini, jama’ahnya merasa sangat dekat dan mengenal materi apa saja yang diajarkan oleh sang guru.

Madrasah Sirajul Huda ini dapat dikatakan lembaga pendidikan Islam yang masih menggunakan sistem klasik, kemudian dalam perkembangan selanjutnya madrasah ini juga pelang-pelang ikut dalam arus tuntutan perkembangan zaman, sehingga dari sisi kelembagaan maupun sistem pendidikannya mengalami pembaharuan. Tuntutan zaman untuk merupakan status kehidupan lembaga pendidikan Islam pada madrasah tersebut merupakan suatu keniscayaan untuk melakukan evaluasi dalam program lebih lanjut.

Pendidikan Islam harus menghindari apa yang telah dilakukan di masa lalu yang cenderung lebih mengedepankan cara yang tidak dialogis, karena proses pembelajaran menekankan pada transmisi informasi, hafalan, dan repetisi. Mendengar, menghafal, dan mengulang adalah metode yang banyak dipakai dalam proses pembelajaran di Madrasah di masa lalu. Proses pedagogis seperti ini membuat peserta didik menjadi subyek yang pasif, sedangkan guru menjadi subyek yang aktif karena mereka bertindak sebagai transmisi pengetahuan, tradisi, dan dogma (ZA, 2014). Dalam hal ini beberapa tahun keberadaan madrasah ini melakukan perkembangan berupa transformasi kelembagaan maupun sistem pendidikannya.

### **1. Pondok Pesantren Sirajul Huda Tigabinanga**

Syarifuddin menjelaskan bahwa lembaga Pendidikan Islam non formal yaitu Madrasah Sirajul Huda dibentuk menjadi pesantren. Hal ini disebabkan adanya para murid yang jauh dari Pondok Pesantren kemudian difasilitasi dengan pondok untuk mereka tinggal di Pesantren. Sesuai dengan hasil musyawarah pada saat itu, bahwa masjid telah tersedia, tempat untuk mondok telah disediakan, santri telah ada, serta para gurunya dalam satu lingkungan maka disepakatilah untuk membentuk sebuah Pesantren (Sembiring, 2016).

Sebelum resmi menjadi sebuah pondok pesantren, terlebih dahulu lembaga pendidikan Islam ini membentuk sebuah yayasan. Pada 22 Juni 1968, sesuai peraturan pemerintah, dibentuk Yayasan Sirajul Huda sebagai Badan Pengelola Madrasah Islamiyah Sirajul Huda, dan dilegalkan berdasarkan Akte Notaris Rusli, No. 44 tanggal 11 September 1968. Sejak pembentukannya sampai sekarang Yayasan Sirajul Huda telah beberapa kali bertukar Ketua Umum, di antaranya: pada tahun 1968 hingga 1974 oleh H. Rahmat Sebayang, pada 1974 hingga 1986 oleh H. Raja Shaf Tarigan, pada 1986 oleh H. K.P. Malik Tarigan. Pada 11 September 1968, Sirajul Huda dilegalformalkan menjadi Yayasan Sirajul Huda. Dalam akte No. 44 yang dibuat notaris Rusli SH, tercantum nama Haji Rahmat Sebayang sebagai ketua umum pertama. Setelah itu Yayasan Sirajul Huda telah beberapa kali berganti akte.

Pada 17 Juli 1991 Yayasan Sirajul Huda mendirikan Pondok Pesantren Sirajul Huda dengan tujuan melahirkan kader-kader berkualitas insan kamil serta memiliki keseimbangan dalam pengalaman Agama dan penguasaan IPTEK. Sejak saat itu Pondok Pesantren Sirajul Huda telah dipimpin oleh enam orang Ustad / Ustazah, yang masing-masing adalah Ustad Najamuddin Nasution (1991 – 1993), Ustad Darwis Husen Lc (1993 – 1995), Ustad Abdul Rauf (1995 – 1997), Ustazah Dra. Nur Janah (1997 – 1998), Ustad H. Abdul Aziz Tarigan Lc (1998 – 2005), Ustad Drs. H. Abdul Muthalib Djuan Tarigan S. Ag (2005 - 2014), Ustad H. Syaifuddin Tarigan (2014 – sekarang)

Untuk memenuhi tanggungjawabnya terhadap umat Islam Karo, Pondok Pesantren Sirajul Huda dikemas dengan visi yaitu terciptanya kader-kader muda Islam yang berkualitas dalam memakmurkan bumi Allah dengan *maqam* keimanan dan ketaqwaan yang tinggi, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni, serta dengan keteguhan dan kesungguhan dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur Islam demi kemashlahatan umat.

Adapun Misi Pondok Pesantren Sirajul Huda adalah:

- a. Menjadikan Pondok Pesantren Sirajul Huda sebagai lembaga pendidikan yang kuat, bersih, modern dan mampu berkompetisi guna melahirkan alumni-alumni yang berkualitas.
- b. Menyelaraskan diri pada perkembangan pesat dunia pendidikan dengan meningkatkan kualitas dan profesionalitas tenaga edukatif demi tercapainya cita-cita Pondok Pesantren Sirajul Huda dan dunia pendidikan.
- c. Menyiapkan lahirnya generasi berakhlak mulia (akhlaqul karimah) dengan tingkat pengabdian yang tinggi serta kecanggihan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki keteguhan jiwa yang kreatif, inovatif dan istiqomah (S. D. Tarigan, 2003).

Untuk mewujudkan tujuan itu, Pondok Pesantren Sirajul Huda melengkapi diri dengan berbagai faktor dukung yang menjadi dasar pengembangan. Faktor-faktor itu adalah:

a. Tanah

1) Hak milik (5. 651 M<sup>2</sup>)

- a) Sebidang tanah ukuran  $\pm 54 \times 45 \text{ M}^2$  (2.430 M<sup>2</sup>), yang di atasnya berdiri bangunan sekolah, rumah direktur Pondok Pesantren, dan lapangan olah raga.
- b) Sebidang tanah ukuran  $\pm 40 \times 50 \text{ M}^2$  (2.000 M<sup>2</sup>), yang di atasnya ditanami pohon kelapa dan kemiri.
- c) Sebidang tanah ukuran  $\pm 33 \times 37 \text{ M}^2$  (1. 221 M<sup>2</sup>), yang di atasnya berdiri asrama putri.

2) Hak Kelola (1. 193 M<sup>2</sup>)

- (1) Sebidang tanah ukuran  $\pm 16 \times 22 \text{ M}^2$  (352 M<sup>2</sup>), beserta Masjid al-Huda yang berdiri di atasnya.
- (2) Sebidang tanah ukuran  $\pm 15 \times 15 \text{ M}^2$  (225 M<sup>2</sup>), yang di atasnya berdiri asrama putra.
- (3) Sebidang tanah ukuran  $\pm 8 \times 30 \text{ M}^2$  (240 M<sup>2</sup>), yang di atasnya berdiri ruang serba guna dan kantin.

- (4) Sebidang tanah ukuran  $\pm 6 \times 12 \text{ M}^2$  ( $72 \text{ M}^2$ ), yang di atasnya berdiri ruang makan.
- (5) Sebidang tanah ukuran  $\pm 6 \times 12 \text{ M}^2$  ( $72 \text{ M}^2$ ), yang di atasnya berdiri dapur, gudang dan kamar mandi.
- (6) Sebidang tanah ukuran  $\pm 6 \times 12 \text{ M}^2$  ( $72 \text{ M}^2$ ), yang di atasnya berdiri rumah guru.
- (7) Sebidang tanah (pekarangan masjid), ukuran  $\pm 8 \times 20 \text{ M}^2$  ( $160 \text{ M}^2$ ), yang di atasnya terdapat lapangan badminton.

b. Bangunan

- 1) Masjid
- 2) Ruang belajar (16 lokal, permanen  $\pm 9 \times 7 \text{ M}^2 = 63 \text{ M}^2$ )
- 3) Ruang direktur (permanen, ukuran  $\pm 6 \times 20 \text{ M}^2 = 120 \text{ M}^2$ )
- 4) Rumah guru (permanen, ukuran  $\pm 6 \times 12 \text{ M}^2 = 72 \text{ M}^2$ )
- 5) Rumah wakaf (semi permanen, ukuran  $\pm 8 \times 12 \text{ M}^2 = 96 \text{ M}^2$ )
- 6) Asrama putra (permanen, kapasitas 180 santri)
- 7) Asrama putri (semi permanen, lantai 2, kapasitas 100 santriah)
- 8) Ruang makan (semi permanen, ukuran  $\pm 6 \times 12 \text{ M}^2 = 72 \text{ M}^2$ )
- 9) Ruang mandi (semi permanen, ukuran  $\pm 6 \times 12 \text{ M}^2 = 72 \text{ M}^2$ )
- 10) Kantin dan ruang serba guna
- 11) Lapangan olahraga (volly, badminton, takraw, basket)
- 12) Perpustakaan (dilengkapi  $\pm 1.000$  eks buku/ 250 judul)
- 13) Laboratorium komputer (dilengkapi 6 unit komputer)
- 14) Meubeler

Berdasarkan data yang penulis terima mulai dari tahun 2000, tidak ada perkembangan jumlah murid yang signifikan dari tahun ke tahun. Walaupun terdapat perkembangan pada peserta didik, tidak dalam jumlah yang besar, hanya berada dalam angka yang kecil. Untuk perkembangan peserta didik selanjutnya dari tahun 2000 dapat dikatakan stabil tidak meningkat secara drastis maupun mengalami penurunan yang sangat drastis, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Jumlah Perkembangan Murid Pondok Pesantren Sirajul Huda**

Tahun	Jumlah
2000	235
2001	241

2002	239
2003	222
2004	249
2005	279
2006	269
2007	289
2008	249
2009	238
2010	233
2011	265
2012	245
2013	275
2014	275
2015	268
2016	241
2021	186

Murid murid dari Pondok Pesantren Sirajul Huda ini merupakan murid yang berasal dari lembaga-lembaga pendidikan formal yang diasuh oleh yayasan Pondok Pesantren Sirajul Huda Tigabinanga seperti SD bersubsidi, Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah sirajul Huda. Walaupun pondok pesantren yang telah diakui legalitasnya pada tahun 2019, tetapi Pondok Pesantren Sirajul Huda Tigabinanga Kabupaten Karo ini tetap dalam status lembaga pendidikan Islam non formal. Hanya saja dikatakan pesantren oleh pengurus yayasan karena lembaga tersebut telah memenuhi unsur pesantren seperti tempat tinggal guru, masjid, tempat tinggal murid, memiliki kurikulum pesantren diluar dari kurikulum lembaga pendidikan formal yang diasuh, dan mempunyai murid yang mondok.

Legalisasi pesantren 2019 mengakui dan memberikan kedudukan yang setara atas ilmu dan keahlian yang diperoleh melalui proses pendidikan ini. Proses legalisasi tidak diragukan lagi mengarah pada transformasi nilai-nilai pedagogis yang telah lama tertanam di lingkungan pesantren, yang dikompromikan agar lebih selaras dengan modernitas dan administrasi formal. Sejak berlakunya undang- undang pesantren 2019, pemerintah Indonesia kini mengakui tiga arus utama dalam sistem pendidikan nasional, dua yang pertama adalah hasil dari reformasi konvergensi pada tahun 1950 dan yang ketiga karena undang-undang tahun 2019. Mereka yang lulus dari sistem pesantren sekarang memiliki hak yang sama untuk menuntut ilmu dan mencari pekerjaan formal (Nurtawab & Dedi Wahyudi, 2022).

Pendidikan berbasis tradisi pesantren kini dituntut memiliki indikator formal untuk berkontribusi pada pembangunan nasional. Baik nilai-nilai tradisional maupun modern yang seolah-olah berada dalam oposisi biner selama abad ke-19 dan ke-20, kini mencoba untuk hidup berdampingan dalam sistem pendidikan berbasis tradisi pesantren yang diformalkan dan birokratisasi. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa untuk saat ini pendidikan pada lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dituntut untuk menjadi status lembaga pendidikan formal, merupakan suatu hal yang unik bagi lembaga pendidikan Islam pada Pondok Pesantren Sirajul Huda Kabupaten Karo yang telah berdiri pada tahun 1991 sampai saat ini masih dalam status lembaga pendidikan Islam non formal. Begitu juga Madrasah Sirajul Huda sebelum bertransformasi menjadi sebuah pondok pesantren status lembaga pendidikan Islam tersebut merupakan lembaga pendidikan non formal (Nurtawab & Dedi Wahyudi, 2022).

Terjadinya transformasi lembaga pendidikan Islam non formal yang mula-mula di Kabupaten Karo pada Pondok Pengajian di Tiga Beringin, kemudian menjadi Madrasah Sirajul Huda dan akhirnya menjadi sebuah Pondok Pesantren Sirajul Huda merupakan salah satu strategi untuk kemajuan lembaga pendidikan Islam non formal di Karo. “Ada beberapa strategi yang dapat ditempuh pendidikan Islam untuk mempertahankan eksistensinya, antara lain: a) merancang pendidikan Islam yang inovatif, b) reformasi dan pembaharuan pendidikan Islam, c) peningkatan teknologi dan literasi, dan d) konsep integrasi dan interkoneksi pendidikan Islam. Dengan keempat isu tersebut, diharapkan kehadiran pendidikan Islam tetap terjaga dan terus berkembang di era Revolusi Industri 4.0” (M.Imamuddin, 2022).

#### **D. KESIMPULAN**

Lembaga pendidikan Islam yang dimiliki oleh Kabupaten Karo adalah lembaga pendidikan Islam non formal yang berdiri pada tahun 1920. Lembaga pendidikan Islam tersebut terus berkembang sesuai dengan arus perkembangan zaman dengan melakukan transformasi pada kelembagaan maupun sistem pendidikannya. Selain dari itu tidak ada lembaga pendidikan Islam non formal di Kabupaten Karo yang melakukan transformasi dalam melakukan perkembangan pendidikan. Walaupun ada lembaga pendidikan Islam non formal lain seperti majelis taklim atau madrasah tingkat awaliyah dan sejenisnya tidak melakukan perkembangan dalam transformasi, lembaga-lembaga tersebut lebih condong mengalami pembaharuan kelembagaan maupun sistem pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. Z. (2021). Problematika Pendidikan Agama Islam di Daerah Minoritas Muslim". *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(1), 157.
- Bangun, T. (2003). *Pelopop/ Pengembang Agama Islam di Kabupaten Karo Perintis dan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesi*.
- Burhanuddin, N. (2019). Religious conflict and regional autonomy in church establishment and Islamic clothing in West Pasaman and Dharmasraya". *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(2).
- Kantor Kementerian Agama. (2021). *Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo Tahun 2021*.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Penerbit Tiara Wacana.
- M.Imamuddin. (2022). The Era of Industrial Revolution 4.0 and the Existence of Islamic Education at Indonesia". *Jurnal Pendidikan Islam, Tadris*, 17(1).
- Madmarn, H. (2001). "Transformasi Sistem Pendidikan Islam: Pergulatan Identitas Muslim Melayu-Patani", dalam *Studia Islamika*. *Indonesian Journal For Islamic Studies*, 8(1).
- Nurtawab, E., & Dedi Wahyudi, "R. (2022). Restructuring Traditional Islamic Education in Indonesia: Challenges for Pesantren Institution. *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 29(1).
- Profil Pondok Pesantren. (2005). *Profil Singkat Pondok Pesantren Sirajul Huda Tiga Binanga 2005/2006*.
- Sembiring, I. M. (2016). *"Sejarah Pondok Pesantren Sirajul Huda Tiga Binanga Kabupaten Karo 2016*. UINSU Medan.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi sejarah, cet 2*. Penerbit Ombak.
- Tarigan, S. (2021). *Mantan Pengurus Yayasan Sirajul Huda, wawancara di Desa Kuala Baru, Tanggal 7 Desember 2021*.
- Tarigan, S. D. (2003). *Madrasah Sirajul Huda dan Tuan Guru Haji Sulaiman Tarigan dalam Peta Perkembangan Islam Kabupaten Karo*. Juanta Tunasmulia.
- Warsah, I. (2019). "Muslim Minority In Yogyakarta: Between Social Relationship And Religious Motivation." *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, 7(2).
- ZA, T. (2014). Isu-Isu Kritis Dalam Pendidikan Islam Menurut Perspektif Pedagogik Kritis". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 13(2).